

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Menteri pertanian yaitu Andi Amran Sulaiman, sudah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022, bahwa petani tahun 2024 bisa menebus pupuk subsidi hanya dengan menggunakan KTP dibuktikan dengan postingan Kementerian Pertanian di Instagram Kementerian Pertanian tanggal 29 Desember 2023. Kebijakan program kartu tani dalam distribusi pupuk subsidi adalah program gagal yang dilakukan pemerintah, selama keberjalanannya dari 2017 hingga sekarang tidak ada kemajuan bahkan akan dihapuskan.

Kesulitan dalam penelitian ini yaitu sulitnya untuk mendapatkan jawaban yang empiris terkait fenomena dan situasi di lapangan secara akurat karena pembahasan memiliki sentiment tersendiri, narasumber menyembunyikan faktanya sehingga menjawab secara normatif dan banyaknya subjek di lapangan sehingga perlu menganalisis dari berbagai perspektif yang berbeda.

Mobilisasi, variabel ini melihat dari bentuk kelompok-kelompok kepentingan untuk saling mengajak menggunakan kebijakan. Berdasarkan temuan di lapangan. sosialisasi yang dilakukan masih kurang beragam dan kurang variatif karena pemerintah memberikan pernyataan bahwa petani tidak mudah menerima informasi tentang kebijakan kartu tani. kios merasa kecewa dengan pihak bank yang tidak begitu responsif dalam menerima keluhan. Artikulasi. Temuannya dari setiap kelompok kepentingan mengungkapkan masalahnya sendiri, petani bilang bahwa

pupuknya langka dan habis padahal sebetulnya itu karena mereka membawa seluruh kuota pupuk pada kartu tani. Petani menyampaikan keresahannya kepada

PPL wilayah binaannya setelah itu dilakukan musyawarah untuk mencapai Solusi. Kios mengeluhkan terjadi dobel salur pupuk subsidi karena KTP dan Kartu Tani tidak terintegrasi dalam satu sistem sehingga tidak sinkron. Agenda Setting, temuan dari variabel ini melihat adanya pengaturan dalam kebijakan kartu tani oleh kelompok kepentingan yang memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Terdapat orang di belakang kios pupuk subsidi itu adalah anggota dewan perwakilan rakyat dan pemilik CV distributor itu adalah dewan perwakilan rakyat. Terdapat kelompok oknum lurah yang menjual pupuk subsidi keluar wilayah edar yaitu kecataman. Negosiasi dan Kompromi, temuannya terdapat masalah teknis mesin EDC rusak, kartu tani hilang dan rusak, proses perbaikannya lama sekali karena hanya ada satu orang *call center* bank mandiri yang mengurus kartu tani sehingga selalu PPL yang menghubungi pihak bank agar di percepat.

Terdapat ketidaksesuaian isi peraturan dengan dilapangan bahwa fenomena dobel salur penebusan antara kartu tani dengan mesin EDC dan T-Pubers yang tidak saling sinkron. Informasi, pemerintah mengeluhkan respon dari penerima kebijakan yang lambat yaitu petani, selain itu sulitnya mengumpulkan petani dalam satu tempat dan satu waktu selain itu petani tidak berminat dan bahkan tidur saat sosialisasi. Dukungan, Perbaikan mesin EDC hingga 1-2 minggu yang membuat petani telat mendapatkan pupuk subsidi. Pembagian potensi, kewenangan yang terbagi kepada beberapa instansi dan tim membuat sulitnya pengambilan keputusan dalam suatu masalah. DKP3, Dinas Perdagangan dan bank memiliki wewenangnya

masing-masing dan sulit untuk duduk bertiga jika ada masalah karena dibatasi oleh wewenangnya masing-masing untuk mengeksekusi sebuah Keputusan.

5.2 Saran

Penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan kartu tani dalam penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Majalengka menggunakan teori *interest group*. Peneliti mendapatkan tantangan dan hambatan saat melaksanakan penelitian sehingga perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan dari tantangan yang dihadapi oleh peneliti. terdapat beberapa saran dan rekomendasi dari peneliti kepada para aktor dan *stakeholders* yang terlibat dalam kebijakan kartu tani. Banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Saran yang diberikan peneliti yaitu:

1. Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang subjektif membuat peneliti cukup kesulitan dalam menentukan waktu dan suasana yang pas dalam melakukan pengambilan data primer melalui wawancara sehingga narasumber dapat terpengaruhi oleh suasana. Perlu independensi peneliti dalam meningkatkan objektivitas dan temuan di lapangan agar penelitian dapat berjalan sesuai harapan. Perlu dilakukan observasi secara menyeluruh dari setiap fenomena agar mendapat bukti yang lebih konkret dan akuntabel. Sikap persuasif peneliti saat melakukan wawancara perlu dilakukan karena untuk mendapat respon narasumber yang tepat sasaran.
2. Setiap kelompok kepentingan perlu melakukan kolaborasi yang aktif untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas suatu kebijakan.

Kelompok-kelompok kepentingan wajib mendahului kepentingan publik diatas kepentingan pribadi. Pemerintah, swasta dan masyarakat perlu meningkatkan intensitas duduk bersama untuk merancang strategi dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kebijakan.

3. Pemerintah perlu melakukan revisi besar-besaran terhadap kebijakan kartu tani karena selama penyelenggaraannya jauh dari kata baik. Pemerintah perlu memberikan sebuah terobosan baru untuk mekanisme penebusan pupuk subsidi bukan kembali memakai KTP sehingga menimbulkan masalah yang sama seperti sebelumnya.